KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Penangkapan Samin Tan - Leterlibatan Pihal Lain Didalami
Tanggal : Rabu, 07 April 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PENANGKAPAN SAMIN TAN

Keterlibatan Pihak Lain Didalami

JAKARTA, KOMPAS — Penangkapan Samin Tan, pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal, membuka jalan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-1, termasuk memanggil pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Keberhasilan ini juga dapat memotivasi KPK menangkap buronan lain.

Deputi Penindakan KPK Karyoto menjelaskan, Samin masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak April 2020. Sejak saat itu, tim penyidik KPK dengan dibantu Kepolisian Negara RI mencari Samin di beberapa tempat di sekitar Jakarta. Hingga akhirnya Senin (5/4/2021), KPK mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keberadaan Samin.

"Tim bergerak dan memantau keberadaan tersangka yang sedang berada di salah satu kafe di wilayah Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dan langsung dilakukan penangkapan," kata Karyoto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/4).

Perkara Samin merupakan pengembangan operasi tangkap tangan pada 13 Juli 2018 di Jakarta terkait pembangunan PLTU Riau-1. Kasus ini melibatkan bekas anggota DPR, Eni Maulani Saragih; pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo; dan politisi Golkar Idrus Marham. Ketiganya dijatuhi hukuman dengan vonis yang berkekuatan hukum tetap.

Pada Oktober 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan terminasi atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Diduga PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) milik Samin telah mengakuisisi PT AKT. Untuk menyelesaikan hal itu, Samin meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk Eni, dalam permasalahan pemutusan PKP2B Generasi III di Kalimantan Tengah antara PT AKT dan Kementerian ESDM.

Eni menyanggupi permintaan Samin dengan memengaruhi beberapa pihak di Kementerian ESDM, termasuk menggunakan forum rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian ESDM. Posisi Eni saat itu adalah anggota panitia kerja (panja) mineral dan batubara di Komisi VII DPR.

Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin untuk keperluan pilkada suaminya di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pada Juni 2018, diduga telah terjadi pemberian uang dari Samin melalui stafnya dan tenaga ahli Eni di DPR sebanyak dua kali dengan total Rp 5 miliar.

Dengan tertangkapnya Samin ini, Karyoto mengatakan, KPK akan mengembangkan kasus ini, termasuk mendalami peran beberapa pihak yang sebelumnya dikaitkan dengan perkara ini, seperti mantan anggota DPR dari Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng. Sebelumnya, Mekeng pernah dicegah ke luar negeri oleh KPK pada 2019.

Selain Mekeng, KPK juga akan mendalami peran mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan. Jonan pernah dipanggil KPK pada 2019 sebagai saksi terkait kasus ini.

"Dengan pihak-pihak lain, tentunya kami kembangkan, seperti Pak Mekeng, kemudian Jonan. Nanti kami lihat sampai sejauh mana perannya," kata Karyoto.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, penangkapan Samin merupakan terobosan yang bagus bagi pengusutan kasus suap ini. Sebab, kasus ini nilainya sangat besar dan melibatkan banyak pihak, mulai dari swasta sampai pemerintah.

Sahroni berharap KPK bisa mengorek siapa pun yang terlibat dalam kasus ini dari tingkat operator sampai tingkat pengambil kebijakan. Ia ingin kasus ini diusut sampai tuntas.

Kasus Harun Masiku

Karyoto menegaskan, saat ini KPK tetap memburu DPO lainnya yang belum tertangkap. Salah satunya, Harun Masiku, tersangka kasus suap terhadap bekas anggota Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan.

KPK telah membentuk tim pencarian DPO. Mereka dilepaskan dari tugas sehari-hari. "Mudah-mudahan dalam waktu singkat yang akan datang juga masih bisa kita cari DPO lain. Nanti pas kami datang ada, kami tangkap," kata Karyoto.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman, mengatakan, penangkapan Samin dapat memotivasi para penyidik KPK terus mengejar Harun Masiku. KPK dapat mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengejar para buron. Dengan demikian, kasus bisa dituntaskan dan juga tidak mangkrak karena para tersangkanya melarikan diri.

Khusus untuk Harun Masiku, ia meminta KPK merombak tim yang mengejar DPO itu.

(PDS)

PERPUSTAKAAN DPR RI